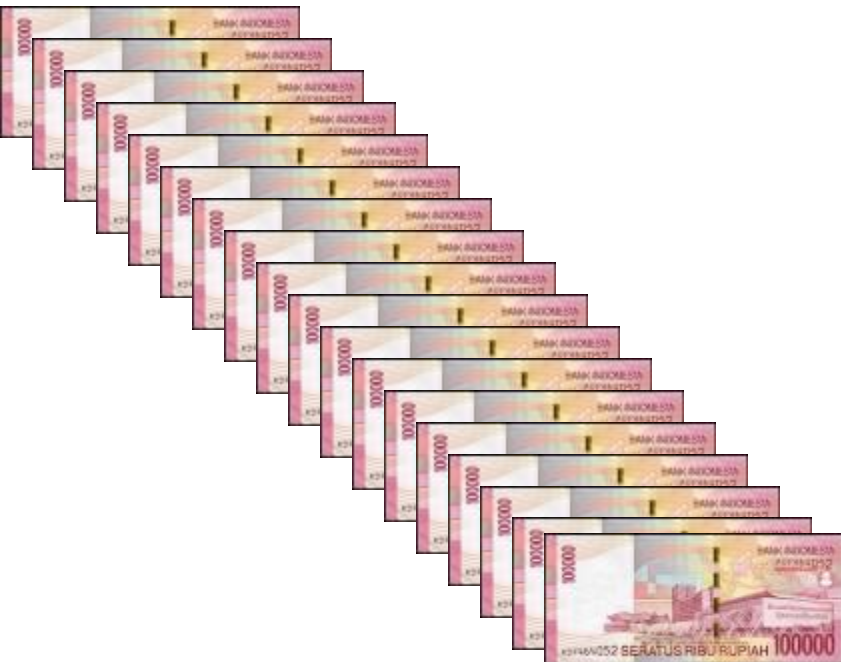


# TATA KELOLA PUSAT KAJIAN ANGGARAN



**Dr. Asep Ahmad Saefuloh, M.Si**

**Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI**

# TUPOKSI PUSAT KAJIAN ANGGARAN

## TUGAS

Mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang perancangan APBN.

## FUNGSI :

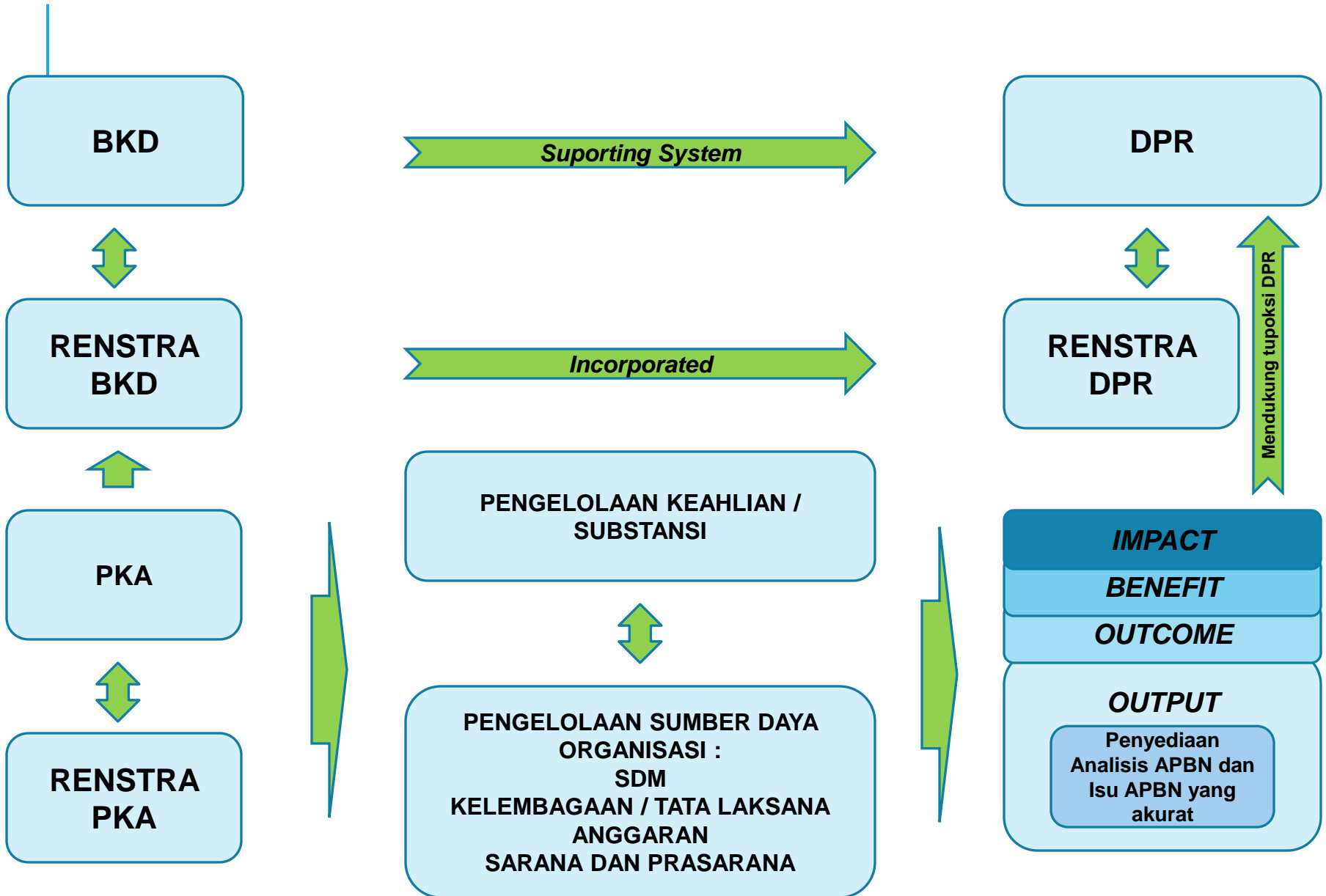
- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Kajian Anggaran;
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Kajian Anggaran;
- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Kajian Anggaran;
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Kajian Anggaran;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pengkajian anggaran;
- f. Pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran;
- g. Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Anggaran;
- h. Penyusunan laporan kinerja Pusat Kajian Anggaran; dan,
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Pusat Kajian Anggaran.

Jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

Kelompok bidang keahlian dapat dibentuk koordinator .

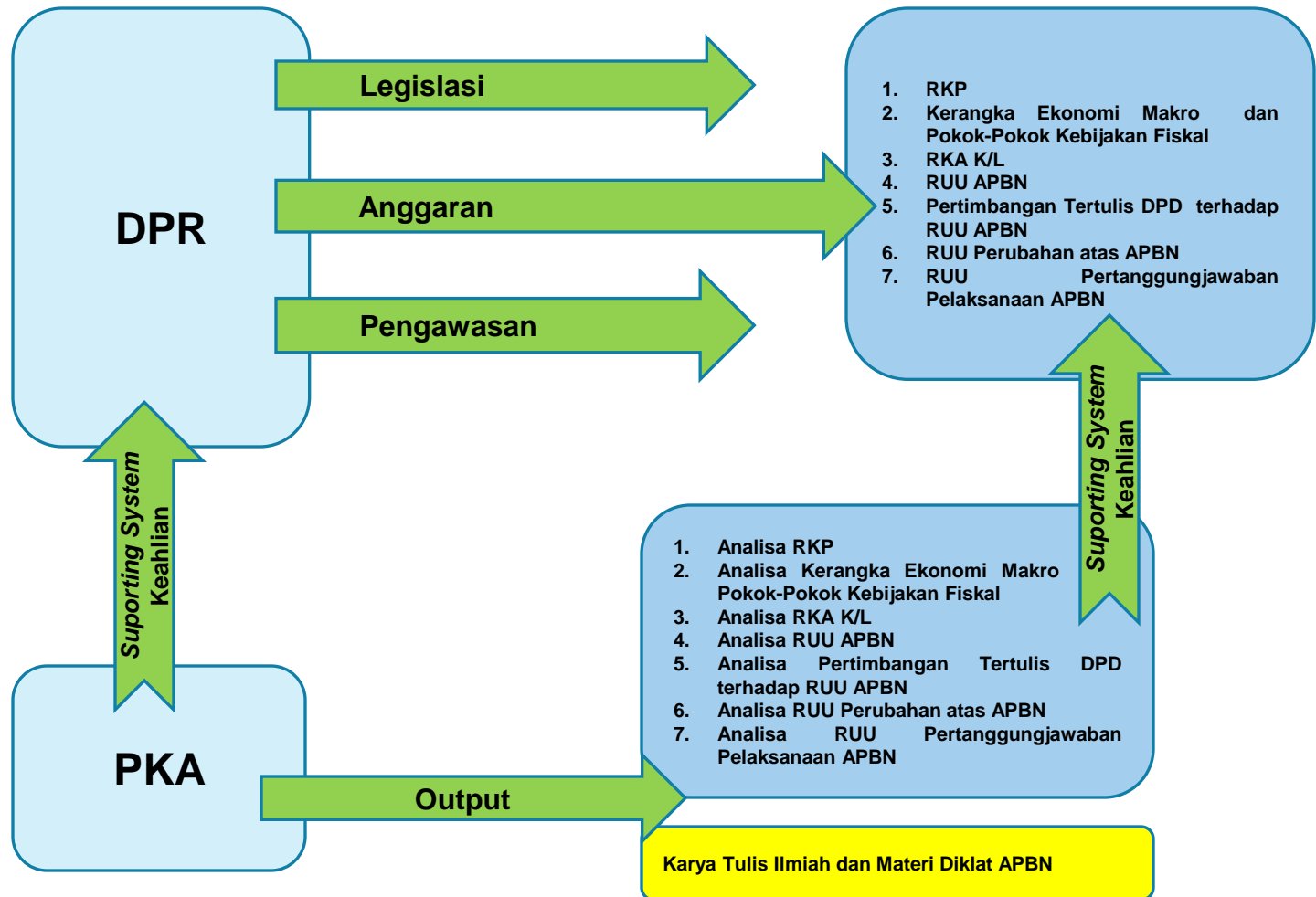
# PENGELOLAAN PUSAT KAJIAN ANGGARAN



# RENSTRA PKAN 2016-2019

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan dan Strategi		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Komponen Kegiatan	Outcome/Output	Indikator	Unit Pelaksana
Menjadi Badan Keahlian DPR RI yang profesional, andal, dan akuntabel				Memberikan dukungan keahlian pada pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI melalui peningkatan kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan	11	Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan		Terwujudnya dukungan keahlian di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI	Persentase tersedianya kajian/analisis/referensi/laporan di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan serta isu-isu terkait kedewanan	Badan Keahlian
	Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan.	Tercapainya penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan.	Penyediaan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian anggaran kepada DPR RI yang tepat waktu	Peningkatan kualitas dan kuantitas analisis APBN yang didukung dengan penyediaan jabatan fungsional analis APBN yang cukup. Selain itu, harus diimbangi dengan pengembangan kompetensi dan kapasitas keahlian analis anggaran yang mumpuni	5798	Penyusunan Kajian Anggaran		Analisis/referensi/ laporan APBN	Jumlah Analisis/referensi/laporan APBN	Pusat Kajian Anggaran
Menjadi Pusat Kajian Anggaran sebagai organisasi pendukung DPR RI bidang keahlian anggaran yang profesional, andal dan akuntabel				Peningkatan kualitas produk analisis dan karya tulis ilmiah serta materi diklat APBN melalui penyediaan dan pengembangan kompetensi Analis APBN yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang didukung dengan penyusunan instrumen pembinaan jabatan fungsional Analis APBN.	5798	Penyusunan Kajian Anggaran		Analisis/referensi/ laporan APBN	Jumlah Analisis/referensi/laporan APBN	Pusat Kajian Anggaran
		a. Terwujudnya tatakelola dukungan kajian anggaran yang baik.	a. Pengelolaan dukungan kajian anggaran yang baik.	Perumusan bahan kebijakan Pusat Kajian Anggaran.	051	Perumusan bahan kebijakan Pusat Kajian Anggaran	Perumusan bahan kebijakan Pusat Kajian Anggaran	Bahan kebijakan Pusat Kajian Anggaran	Jumlah bahan kebijakan Pusat Kajian Anggaran	
	1. Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan.	b. Terwujudnya penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang membentuk arah politik anggaran Dewan.	b. Penyediaan produk Kajian APBN yang tepat waktu.	Penyusunan Analisis, Referensi dan Analisis Ringkas Cepat APBN.	052	Penyusunan dan Pengembangan analisis/referensi/ laporan APBN	Penyusunan analisis/referensi/ laporan APBN	Analisis/referensi/ laporan APBN	Jumlah Analisis/ referensi/ laporan APBN	
					A		Penyusunan analisis/referensi/ laporan APBN	Analisis/referensi/ laporan APBN	Jumlah Analisis/ referensi/ laporan APBN	
					1		Penyusunan Analisis APBN	Analisis APBN	Jumlah Analisis APBN	
					2		Penyusunan Referensi	Referensi	Jumlah Referensi	
					3		Penerbitan Kajian Dwimingguan	ARC	Jumlah ARC	
	2. Memperkuat manajemen pengetahuan.	c. Terwujudnya penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan.	c. Penyediaan produk karya tulis ilmiah dan materi diklat APBN.	Penerbitan karya tulis ilmiah dan bahan diklat APBN.	B		Penerbitan Jurnal/buku	Jurnal/Buku	Jumlah Buku	
					1		Penerbitan Jurnal	Jurnal	Jumlah Jurnal	
					2		Penerbitan Buku	Buku	Jumlah Buku	
					C		Penyelenggaraan Database	Database		
3. Memperkuat kelembagaan Pusat Kajian Anggaran sebagai pembina jabatan fungsional Analis APBN.	d. Terwujudnya kelembagaan Pusat Kajian Anggaran sebagai pembina jabatan fungsional Analis APBN yang profesional.	c. Peletakan dasar-dasar jabatan fungsional Analis APBN.	Pembinaan Jabatan Analis APBN.	D		Pembinaan Jabatan Analis APBN.	Analis APBN dan Bahan Pembinaan	Jumlah Analis APBN dan Bahan Pembinaan		
				1		Pengembangan Kompetensi	Penyelenggaraan Diklat	Jumlah Diklat		
				2		Penyusunan Instrumen Pembinaan	Bahan Pembinaan	Jumlah Bahan Pembinaan		
				3		Penyediaan Jabatan Analis APBN/SDM Pendukung	Analisis APBN	Jumlah Analis APBN		

# PENGELOLAAN SUBSTANSI



# PENGELOLAAN SUBSTANSI 1

ANALISA APBN

REFERENSI APBN

KAJIAN ANGGARAN  
DWI MINGGUAN

PENDALAMAN  
MATERI, DATA DAN  
INFORMASI APBN

PENDAMPINGAN

PERMINTAAN

ANALISA RINGKAS  
CEPAT APBN

DATA DAN  
INFORMASI APBN

## Dukungan Kajian APBN

1. RKP
2. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal
3. RKA K/L
4. RUU APBN
5. Pertimbangan Tertulis DPD terhadap RUU APBN
6. RUU Perubahan atas APBN
7. RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN

KARYA TULIS ILMIAH

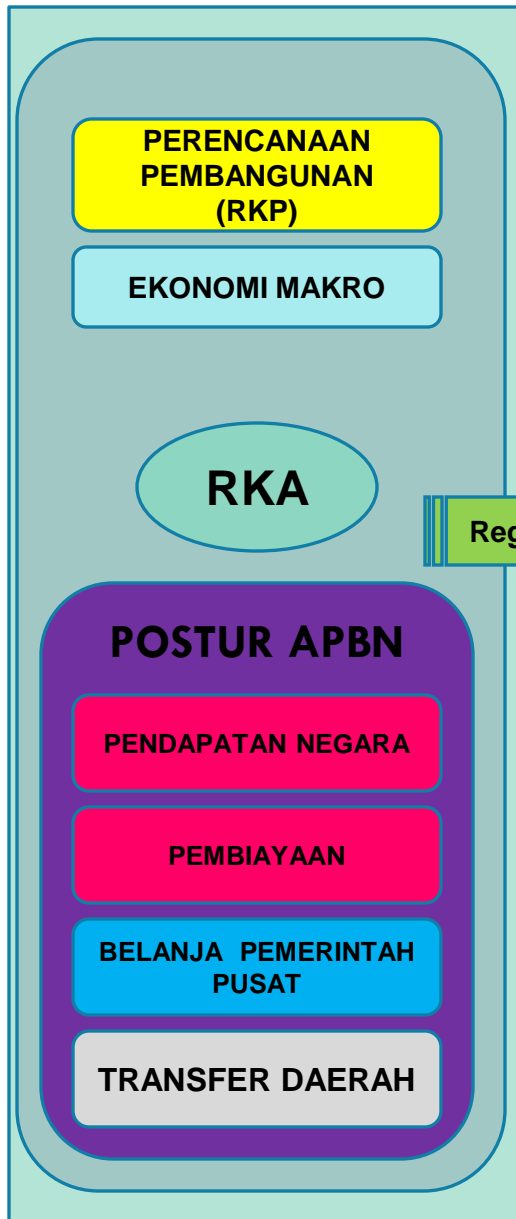
MATERI DIKLAT

Penguatan kelembagaan melalui  
*knowledge management*

# PENGELOLAAN SUBSTANSI 2

No	Kajian	Materi
1	Kajian RKP <sub>t+1</sub>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinkronisasi dengan RPJM</li> <li>2. Sinkronisasi dengan RKP<sub>t</sub></li> <li>3. Analisis RKP<sub>t+1</sub> (Tema dan Sasaran Pembangunan; Arah Kebijakan dan Strategi serta Sasaran Sektoral/Bidang)</li> </ol>
2	Kajian Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal <sub>t+1</sub>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinkronisasi Ekonomi Makro<sub>t</sub></li> <li>2. Sinkronisasi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal<sub>t</sub></li> <li>3. Analisis Asumsi Makro<sub>t+1</sub></li> <li>4. Analisis Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal<sub>t+1</sub></li> </ol>
3	Kajian RKA K/L <sub>t+1</sub>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinkronisasi dengan RKP<sub>t+1</sub></li> <li>2. Sinkronisasi RKA K/L<sub>t</sub></li> <li>3. Analisis RKA K/L<sub>t+1</sub></li> </ol>
4	Kajian RUU APBN <sub>t+1</sub>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinkronisasi dengan Ekonomi Makro<sub>t</sub></li> <li>2. Sinkronisasi dengan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal<sub>t</sub></li> <li>3. Sinkronisasi Fostur APBN<sub>t</sub></li> <li>4. Analisis Fostur APBN<sub>t+1</sub></li> </ol>
5	Kajian Pertimbangan DPD terhadap RUU APBN <sub>t+1</sub>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinkronisasi dengan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal<sub>t</sub></li> <li>2. Sinkronisasi Belanja Daerah<sub>t</sub></li> <li>3. Analisis Belanja Daerah<sub>t+1</sub></li> </ol>
6	Kajian RUU Perubahan atas APBN <sub>t</sub>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal<sub>t</sub> (Kajian Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal<sub>t+1</sub>)</li> <li>2. Sinkronisasi Fostur APBN<sub>t</sub></li> <li>3. Analisis Perubahan atas APBN<sub>t</sub></li> </ol>
7	Kajian RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN <sub>t-1</sub>	Analisis Pelaksanaan APBN <sub>t-1</sub>

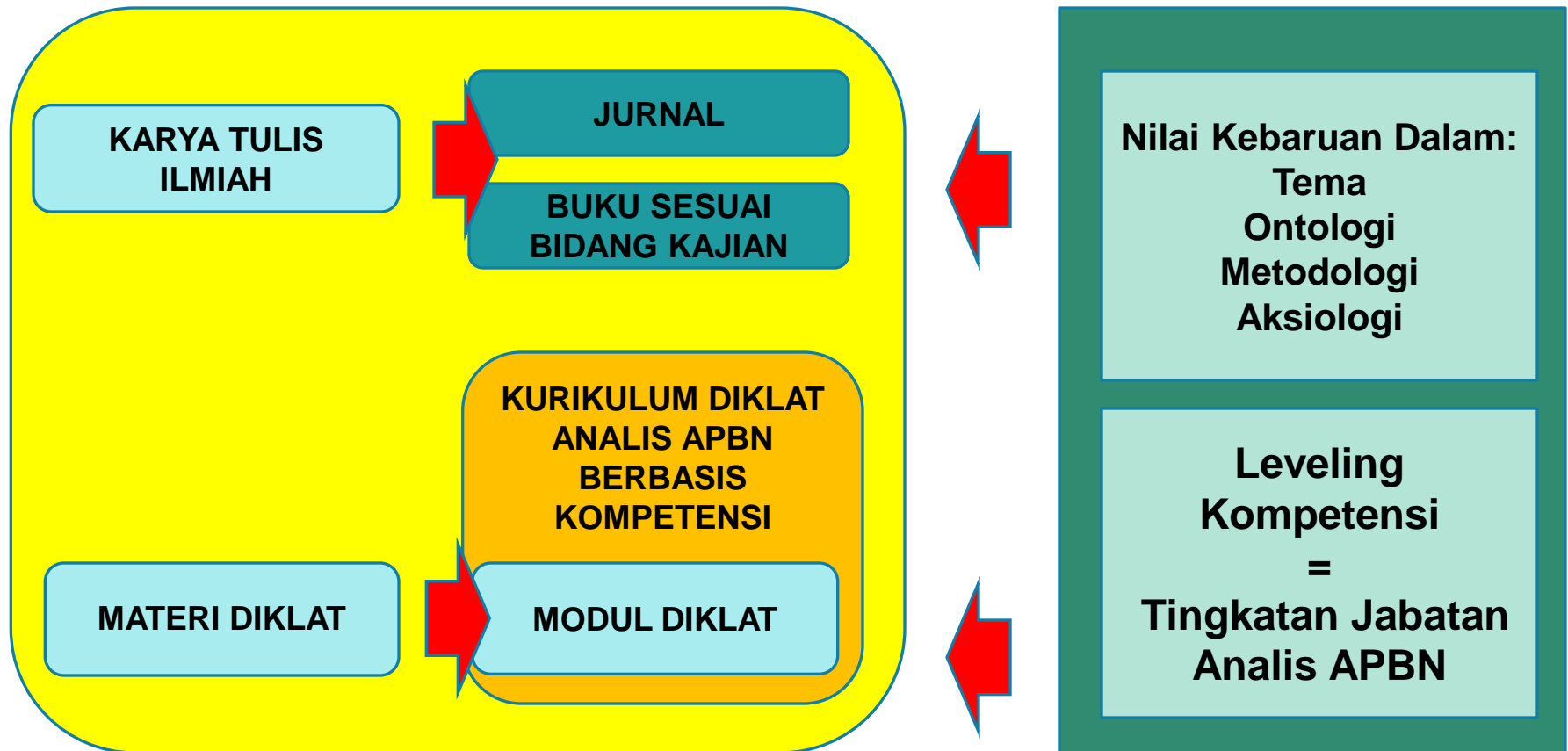
# PENGELOLAAN SUBSTANSI 3



2015	2016-2019
	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No.25 Tahun 2004 tentang SPPN,</li> <li>Perubahan UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,</li> <li>RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan,</li> <li>RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal,</li> <li>RUU tentang Perekonomian Nasional,</li> <li>RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No.23 Tahun 1999 tentang BI</li> <li>UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE</li> <li>UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan</li> <li>RUU tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No.24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 16 Tahun 2009 tentang Perpajakan</li> <li>RUU tentang Penjaminan</li> <li>UU No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak</li> <li>UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi</li> <li>UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara</li> <li>UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun</li> <li>UU No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Pinjama,</li> <li>RUU tentang Penjaminan Polis</li> <li>UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal</li> <li>RUU tentang PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah</li> <li>UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>RUU tentang Bea Materai RUU tentang PBB</li> <li>RUU tentang Pertembakauan</li> <li>UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan</li> <li>UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan</li> <li>UU No.30 Tahun 2001 tentang Energi</li> <li>RUU tentang Pengelolaan SDA</li> <li>RUU tentang Geologi</li> <li>UU No.17 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas</li> <li>RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara</li> <li>UU No.17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara</li> <li>RUU tentang Lelang, RUU tentang Penilai</li> <li>RUU tentang Tabungan Haji,</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (2015), UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (2015)</li> <li>RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat</li> <li>RUU tentang Kedaulatan Pangan</li> <li>RUU tentang Kewirausahaan Nasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah</li> <li>UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</li> <li>RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan,</li> <li>RUU tentang Sistem Pengupahan</li> <li>RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,</li> <li>RUU tentang Perkoperasian</li> <li>RUU tentang Ekonomi Kreatif</li> <li>RUU tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan</li> <li>RUU tentang Ketahanan Keluarga</li> <li>RUU tentang Perlindungan Rumah Tangga</li> <li>UU No.12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Lembaga Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tertinggi/Lembaga Tinggi Negara</li> <li>RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No.33/2003 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah</li> <li>RUU tentang Peningkatan PAD</li> <li>UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang</li> </ol>



# PENGELOLAAN SUBSTANSI 4



# PENGELOLAAN SUMBER DAYA

**DASAR-DASAR  
JABATAN FUNGSIONAL  
ANALISYANG  
PROFESIONAL**

**SDM**

1. Kuantitas
2. Kualitas
3. Jabatan Fungsional Analisis APBN
4. Spesialisasi

**TATALAKSANA**

1. Peraturan/Pedoman
2. SOP

**TATA KELOLA YANG  
BAIK**

**ANGGARAN**

1. Nomenklatur (kegiatan)
2. Besaran Anggaran

**SARANA DAN  
PRASARANA**

1. Kebutuhan ruang
2. Sarana dan prasarana pendukung



# TUGAS KOORDINATOR KEAHLIAN BIDANG

No	Koordinator	Tugas
1	Koordinator Keahlian Bidang Analisa Perencanaan Pembangunan, Ekonomi Makro dan Pendapatan Nasional	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan perencanaan pembangunan;</li><li>2. Melaksanakan dukungan pengkajian perencanaan pembangunan, ekonomi makro dan pendapatan negara.</li><li>3. Menyusun laporan kinerja Bidang Analisa Perencanaan Pembangunan, Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara;</li><li>4. Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Pusat; dan,</li><li>5. Melaksanakan penugasan lain dari Kepala Pusat.</li></ol>
2	Koordinator Keahlian Bidang Analisa Belanja Negara dan Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan analisa belanja negara;</li><li>2. Melaksanakan dukungan analisa belanja negara dan pembiayaan ;</li><li>3. Menyusun laporan kinerja Bidang Belanja Negara dan Pembiayaan;</li><li>4. Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Pusat; dan,</li><li>5. Melaksanakan penugasan lain dari Kepala Pusat.</li></ol>

# TUGAS ADMINISTRASI

No	Jabatan	Kompetensi	Tugas
1	Pengawas (Kepala Sub Bagian Tata Usaha)	Memahami tata usaha (administrasi perkantoran)	<p>Menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Pusat Kajian Anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyiapkan rancangan dan evaluasi renstra Pusat Kajian Anggaran;</li> <li>2) Menyiapkan rancangan RKA Pusat Kajian Anggaran;</li> <li>3) Melaksanakan administrasi pelaksanaan anggaran Pusat Kajian Anggaran;</li> <li>4) Menyiapkan rancangan instrumen peraturan perundang-undangan;</li> <li>5) Melaksanakan administrasi kepegawaian Pusat Kajian Anggaran;</li> <li>6) Melaksanakan administrasi umum Pusat Kajian Anggaran;</li> <li>7) Menyiapkan rancangan LAKIP Pusat Kajian Anggaran;</li> <li>8) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pusat Kajian Anggaran;</li> <li>9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Pusat; dan,</li> <li>10) Melaksanakan tugas lain dari Kepala Pusat.</li> </ol>
2	Pelaksana	Memahami administrasi perkantoran.	<p>Mendukung pelaksanaan tugas Kepala Pusat Kajian Anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menerima, mencatat dan memberi lembar disposisi pada surat masuk untuk diteruskan kepada atasan;</li> <li>2) Mencatat dan memberi lembar pengantar pada surat keluar untuk diteruskan kepada yang bersangkutan;</li> <li>3) Mempersiapkan agenda kerja Kepala Pusat Kajian Anggaran;</li> <li>4) Melaksanakan administrasi Kepala Pusat Kajian Anggaran;</li> <li>5) Mengelola kearsipan Kepala Pusat Kajian Anggaran;</li> <li>6) Menyiapkan teknis rapat Kepala Pusat Kajian Anggaran;</li> <li>7) Menyiapkan rancangan dan evaluasi Renstra Pusat Kajian Anggaran;</li> <li>8) Menyiapkan penyusunan RKA Pusat Kajian Anggaran;</li> <li>9) Menyiapkan revisi DIPA;</li> <li>10) Melaksanakan administrasi realisasi anggaran;</li> <li>11) Melaksanakan administrasi pertanggungjawaban anggaran;</li> <li>12) Menyusun laporan realisasi anggaran;</li> <li>13) Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh Kepala Pusat Kajian Anggaran; dan,</li> <li>14) Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara berkala dan setiap waktu diperlukan.</li> <li>15) Menerima, mencatat dan memberi lembar disposisi pada surat permintaan untuk diteruskan kepada atasan;</li> <li>16) Mencatat dan memberi lembar pengantar pada surat permintaan untuk diteruskan kepada yang bersangkutan;</li> <li>17) Melaksanakan administrasi kepegawaian Pusat Kajian Anggaran;</li> <li>18) Mempersiapkan penilaian jabatan analisa APBN;</li> <li>19) Melaksanakan administrasi umum Pusat Kajian Anggaran;</li> <li>20) Menyiapkan teknis rapat Pusat Kajian Anggaran;</li> <li>21) Menyiapkan rancangan instrumen peraturan perundang-undangan;</li> <li>22) Mencatat laporan analisis dan laporan kegiatan lainnya;</li> <li>23) Melaksanakan kearsipan output Pusat Kajian Anggaran;</li> <li>24) Menyiapkan administrasi PPKP;</li> <li>25) Menyusun laporan realisasi kinerja;</li> <li>26) Menyiapkan rancangan LAKIP;</li> </ol>

# SDM 1: KEBUTUHAN JUMLAH PEGAWAI FUNGSIONAL

No.	AKD	Lingkup	Jumlah Pasangan Kerja	Jumlah Analis (2019)
1	Komisi I	Pertahanan, Luar Negeri, Intelejen, Informasi dan Komunikasi	15	4
2	Komisi II	Dalam Negeri, Sekretariat Negara, dan Pemilu	13	3
3	Komisi III	Hukum, HAM, dan Keamanan	14	3
4	Komisi IV	Pertanian, Pangan, Maritim, dan Kehutanan	5	4
5	Komisi V	Infrastruktur dan Perhubungan	7	3
6	Komisi VI	Industri, Investasi dan Persaingan Usaha	11	4
7	Komisi VII	Energi, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup	15	3
8	Komisi VIII	Agama dan Sosial	7	2
9	Komisi IX	Kesehatan dan Ketenagakerjaan	7	3
10	Komisi X	Pendidikan dan Sejarah, Olahraga, dan Pariwisata	6	3
11	Komisi XI	Keuangan dan Perbankan	13	6
12	Badan Anggaran	Pendapatan dan Pembiayaan		9
		Belanja		
		Transfer Daerah		
13	BURT	Anggaran DPR		1
14	BAMUS	RUU APBN/APBNP/PAN		
15	PIMPINAN DPR	Bidang Koordinasi		5
			113	58

## SDM 2 : KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN PEMBIDANGAN

No	Bidang	2016	2017	2018	2019
1	Bidang Analisa Perencanaan Pembangunan, Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara (KETUA, KORINBANG, KOREKKU, KIV, KV, KVI, KVII, KXI, BURT dan BAMUS)	5	10	22	30
	BANGGAR	1	2	3	3
2	BANGGAR	1	2	6	6
	Bidang Analisa Belanja Negara dan Pembiayaan (KOKESRA, KORPOLKAM, KI, KII, KIII, KVIII, KIX dan KX)	5	11	19	19
	Jumlah	12	25	50	58

### Pasal 19 Ayat (1)

- a. jenis substansi pembahasan APBN;
- b. frekuensi pembahasan APBN;
- c. Jumlah alat kelengkapan; dan
- d. Jumlah anggota DPR RI.

## SDM 3 : KEBUTUHAN PEGAWAI ADMINISTRASI

No.	AKD	2016	2017	2018	2019
1	Pengawas (Kepala Sub Bagian Tata Usaha)	1	1	1	1
2	Pengadministrasi Kepala Pusat	1	1	1	1
3	Pengadministrasi Anggaran	1	1	1	1
4	Pengadministrasi Umum	1	1	1	1
5	Pengadministrasi Laporan	1	2	2	3
	Jumlah	5	6	6	7



## SDM 4 : STATISTIK KEPEGAWAIAN DAN PERENCANAAN

No	Jenis Pegawai	2016	2017	2018	2019
1	Jabatan Tinggi Pratama	1	1	1	1
2	Pengawas	1	1	1	1
3	Analisis APBN	12	25	50	58
4	Pelaksana (JFU)	4	4	6	7
No	Pendidikan	2015	2016	2017	2018
1	S3	1	1	1	1
2	S2	11*	24**	52**	59**
3	S1	4***	4***	2****	5****
4	SMA	2	2	2	2
	Jumlah	18	31	56	65

Ket\* : 1 orang mengikuti program doktor.  
 Ket\*\* : 3 orang mengikuti program doktor.  
 Ket\*\*\* : 2 orang mengikuti program magister.  
 Ket\*\*\*\* : 1 orang mengikuti program magister.

## SDM 5 : SPESIALISASI

Major	Minor
Perencanaan Pembangunan, Ekonomi Makro dan Pendapatan Nasional	Belanja Negara dan Pembiayaan
Belanja Negara dan Pembiayaan	Perencanaan Pembangunan, Ekonomi Makro dan Pendapatan Nasional

# SDM 6 : PENGEMBANGAN KOMPETENSI ANALIS APBN

Jenis Kompetensi	Rincian Pasal 17 Ayat 2 Permenpan N0.39 Tahun 2014	Analisis APBN Ahli Pertama	Analisis APBN Ahli Muda	Analisis APBN Ahli Madya	Analisis APBN Ahli Utama
Kompetensi Teknis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan metodologi dan survei ekonomi;</li> <li>2. Pengetahuan keuangan negara/daerah;</li> <li>3. Pengetahuan perencanaan, penganggaran, dan Pertanggungjawaban keuangan negara/daerah;</li> <li>4. Kemampuan analisis ekonomi;</li> <li>5. Kemampuan analisis statistik ekonomi;</li> <li>6. Kemampuan analisis perencanaan, penganggaran, dan Pertanggungjawaban keuangan negara/ daerah; dan</li> <li>7. Kemampuan analisis dampak kebijakan.</li> </ol>	Ontologi	Epistemologi	Axiologi	Pengembangan
Pengetahuan (Kognitif/Knowledge)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai teknik penelusuran kepustakaan</li> <li>2. Menguasai teknik pengumpulan data</li> <li>3. Menguasai teknik pengolahan data</li> <li>4. Menguasai teknik penulisan analisis dan ilmiah.</li> <li>5. Teknik Presentasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai teknik memimpin kelompok.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai teknik perencanaan analisis.</li> <li>2. Menguasai teknik pengajaran dan pembimbingan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai teknik penulisan buku.</li> </ol>
Kompetensi Sosio kultural	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, politik, swasta dan pemangku kepentingan lainnya;</li> <li>2. Mampu mensosialisasikan dan mempublikasikan kebijakan organisasi dan pemerintah;</li> <li>3. Mampu mengedukasi dan mempengaruhi publik terhadap penerapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan; dan</li> <li>4. Mampu membangun rasa kebangsaan dan nasionalisme masyarakat.</li> </ol>	Kesadaran	Pemahaman	Perilaku	Role Model
Kecakapan (skill)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu berkomunikasi dengan baik</li> <li>2. Mampu mengoperasikan peralatan penunjang penelitian</li> <li>3. Mampu mengolah dan menganalisis data</li> <li>4. Mampu menulis dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menulis abstrak dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar</li> <li>2. Mampu mengoperasikan alat bantu presentasi dan peraga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu memotivasi dengan baik diri sendiri dan orang lain.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menulis dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar.</li> </ol>
Sikap Kerja (attitude)		Jujur, Bertanggungjawab, Disiplin dan Dapat bekerja sama	Kritis dan Kreatif	Motivatif, dan Inovatif	Pengendalian Diri, dan Adaptif

## SDM 7 : KOMPETENSI BIDANG

No	Topik	Kompetensi
1	Perencanaan Pembangunan, Ekonomi Makro dan Pendapatan Negar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penguasaan konsep pembangunan dan perencanaan pembangunan</li><li>2. Penguasaan konsep RKP dan RKA</li><li>3. Penguasaan peraturan perundang-undangan terkait perencanaan</li><li>4. Penguasaan konsep ekonomi makro</li><li>5. Penguasaan perekonomian global</li><li>6. Penguasaan konsep dan analisis perpajakan</li><li>7. Penguasaan konsep dan analisis non perpajakan</li><li>8. Penguasaan peraturan perundang-undangan terkait pendapatan</li></ol>
2	Belanja Negara dan Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penguasaan peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara</li><li>2. Penguasaan peraturan perundang-undangan terkait keuangan daerah</li><li>3. Penguasaan peraturan perundang-undangan terkait pembiayaan</li></ol>

## SDM 8 : PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Topik	2016	2017	2018	2019
Semua Bidang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metodologi Penelitian</li> <li>2. Analisis Strategis</li> <li>3. <i>Regulatory Impact Analysis</i></li> <li>4. Pemodelan 1</li> <li>5. Perancangan Undang-Undang</li> <li>6. Teknik penelusuran kepustakaan</li> <li>7. Teknik Pengumpulan Data</li> <li>8. Teknik Pengolahan Data</li> <li>9. Teknik Penulisan Analisis (ARC) dan Ilmiah.</li> <li>10. Teknik Presentasi</li> <li>11. Manajemen Jurnal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis Kebijakan Publik</li> <li>2. Analisis I-O</li> <li>3. Manajerial (Ahli Muda)</li> <li>4. Tehnik Komunikasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis Politik Anggaran</li> <li>2. Analisis Kebijakan Fiskal</li> <li>3. Matematika APBN</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberlanjutan Fiskal</li> <li>2. Pemodelan 2</li> </ol>
Perencanaan Pembangunan, Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ekonomi Pembangunan</li> <li>2. Pembangunan Berkelanjutan</li> <li>3. Ekonomi Makro</li> <li>4. Perekonomian Domestik</li> <li>5. Analisis Perpajakan</li> <li>6. Analisis Utang Luar Negeri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Regional</li> <li>2. Pembangunan Spasial</li> <li>3. Perekonomian Kawasan</li> <li>4. Perekonomian Global</li> <li>5. Analisis Non Perpajakan (PNBP)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinergitas Pembangunan</li> <li>2. Evaluasi Pembangunan</li> <li>3. Ekonomi Sektor Riil dan Moneter</li> <li>4. Ekonomi SDA</li> </ol>
Belanja Negara dan Pembiayaan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis Daftar Skala Prioritas</li> <li>2. Analisis Belanja Pegawai</li> <li>3. Desentralisasi Fiskal</li> <li>4. Analisis Otonomi Khusus</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis Belanja Barang</li> <li>2. Analisis Belanja Subsidi</li> <li>3. Analisis Belanja Daerah</li> <li>4. Belanja Affirmative</li> <li>5. Analisis Pinjaman Dalam Negeri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis Belanja Modal</li> <li>2. Analisis Ekonomi Proyek</li> <li>3. Analisis Dana Keistimewaan</li> <li>4. Analisis Dana Desa</li> <li>5. Ekonomi Kelembagaan</li> <li>6. Analisis PMN</li> </ol>

# TATALAKSANA1: PEDOMAN TUPOKSI

No	Tugas	Rincian Tugas	Pengaturan
1	Sebagai Instansi Pembina Jabfung Analis APBN	Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Analis APBN	Persekjen tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis APBN.
		Menyusun pedoman impasing.	Persekjen tentang Pedoman Impasing.
		Menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Analis APBN.	Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Analis APBN.
		Pedoman penghitungan kebutuhan jabatan Analis APBN	Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Analis APBN
		Menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Analis APBN.	Persekjen tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis APBN.
		Menyusun kurikulum pelatihan fungsional dan teknis fungsional Analis APBN.	Persekjen tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional dan Teknis Fungsional Analis APBN.
		Mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Analis APBN;	Persekjen tentang Sistem Informasi Jabatan Fungsional Analis APBN.
		Menyusun standar kualitas hasil kerja pejabat fungsional.	Perka tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Pejabat Fungsional;
		Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Analis APBN.	AD/ART Organisasi Profesi Analis APBN.
		Memfasilitasi penyusunan etika profesi dan kode etik Analis APBN.	Etika Profesi Dan Kode Etik Analis APBN dikeluarkan oleh Organisasi Profesi Analis APBN.
		Sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Tim Penilai jabatan fungsional Analis APBN	Pedoman Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Kepada Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis APBN
		Monitoring dan evaluasi dalam rangka penjaminan Kualitas jabatan fungsional Analis APBN	Pedoman Monitoring dan evaluasi dalam rangka penjaminan Kualitas jabatan fungsional Analis APBN
		Tata cara penilaian kinerja Analis APBN dan tata kerja tim penilai kinerja instansi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI	Tata cara penilaian kinerja Analis APBN dan tata kerja tim penilai kinerja instansi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI
Pelaksanaan Uji Kompetensi	Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi		
Tata cara penyesuaian(inpassing) dan pelaksanaan uji kompetensi	Tata cara penyesuaian(inpassing) dan pelaksanaan uji kompetensi		
2	Pembinaan Jabfung Analis APBN	Pembentukan Tim Penilai Internal.	1. SOP Penilaian Jabfung Analis APBN. 2. Kep. Setjen tentang Tim Penilai Jabfung Analis APBN.
3	Tugas Utama	Penyusunan Analisis APBN.	SOP Penyusunan Analisis APBN.
		Penyusunan Referensi APBN.	SOP Penyusunan Referensi APBN.
		Penyusunan Pendalaman Materi, Data dan Informasi.	SOP Penyusunan Pendalaman Materi, Data dan Informasi.
		Penyusunan Analisis Ringkas Cepat.	SOP Penyusunan Analisis Ringkas Cepat.
		Pemberian Data dan Informasi.	SOP Pemberian Data dan Informasi.
		Pendampingan di AKD.	SOP Pendampingan di AKD.
4	Tambahan	Penerbitan Jurnal.	SOP Penerbitan Jurnal.
		Penerbitan Buku Bidang.	SOP Penerbitan Buku Bidang.
		Penerbitan Materi Diklat.	SOP Penerbitan Materi Diklat.
		Pendampingan.	SOP Pendampingan.
		Penyelenggaraan Diskusi/Seminar dan Workshop.	SOP Penyelenggaraan Diskusi/Seminar dan Workshop.
		Mengikuti Diskusi/Seminar dan Workshop	SOP Mengikuti Diskusi/Seminar dan Workshop.

# TATA KELOLA 2 : PERENCANAAN KETATALAKSANAAN

No	Pengaturan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persekjen tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis APBN.	X				X
	Persekjen tentang Pedoman Impasing.	X				X
	Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Analis APBN.		X			X
	Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Analis APBN		X			X
	Persekjen tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis APBN.		X			X
	Persekjen tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional dan Teknis Fungsional Analis APBN.		X			X
	Persekjen tentang Sistem Informasi Jabatan Fungsional Analis APBN.		X			X
	Perka tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Pejabat Fungsional;		X			X
	AD/ART Organisasi Profesi Analis APBN.			X		
	Etika Profesi Dan Kode Etik Analis APBN dikeluarkan oleh Organisasi Profesi Analis APBN.			X		
	Pedoman Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Kepada Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis APBN				X	
	Pedoman Monitoring dan evaluasi dalam rangka penjaminan Kualitas jabatan fungsional Analis APBN				X	
	Tata cara penilaian kinerja Analis APBN dan tata kerja tim penilai kinerja instansi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI				X	
	Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi	X				X
Tata cara penyesuaian(inpassing) dan pelaksanaan uji kompetensi	X				X	
2	1. SOP Penilaian Jabfung Analis APBN.	X			X	
	2. Kep. Setjen tentang Tim Penilai Jabfung Analis APBN.					
3	SOP Penyusunan Analisis APBN.		X		X	
	SOP Penyusunan Referensi APBN.		X		X	
	SOP Penyusunan Pendalaman Materi, Data dan Informasi.		X		X	
	SOP Penyusunan Analisis Ringkas Cepat.		X		X	
	SOP Pemberian Data dan Informasi.		X		X	
	SOP Pendampingan di AKD.		X		X	
4	SOP Penerbitan Jurnal.		X		X	
	SOP Penerbitan Buku Bidang.		X		X	
	SOP Penerbitan Materi Diklat.		X		X	
	SOP Pendampingan.		X		X	
	SOP Penyelenggaraan Diskusi/Seminar dan Workshop.		X		X	
	SOP Mengikuti Diskusi/Seminar dan Workshop.		X		X	

## TATA KELOLA 3 : BENTUK OUTPUT KEGIATAN

No	Output Kegiatan	Dasar Pelaksanaan	Lingkup Kerja	Sistem Kerja	Bentuk Penyajian
1	Analisis APBN	Penugasan	Analisis terhadap 7 Kegiatan Siklus APBN	Tim	Laporan Tertulis
2	Referensi APBN	Penugasan	Analisis terhadap 7 Kegiatan Siklus APBN	Tim	Laporan Tertulis
3	Kajian Anggaran Mingguan	Penugasan	Isu/tema strategis	Individual	Publikasi
4	Pendalaman Materi, Data dan Informasi	Penugasan	Analisis terhadap 7 Kegiatan Siklus APBN	Tim/Individual	Laporan Tertulis
5	Analisa Ringkas Cepat	Penugasan	Analisis terhadap 7 Kegiatan Siklus APBN	Individual	Publikasi
6	Data dan Informasi APBN	Permintaan Anggota	Sesuai Topik Permintaan	Bidang/ Kelompok/Pribadi	Laporan Tertulis
7	Pendampingan	Penempatan	APBN terkait lingkup AKD	Kelompok	Tertulis/Tidak Tertulis
8	Penulisan Karya Tulis (Jurnal)	Penugasan	APBN dan Keuangan Negara	Tim atau individual	Publikasi
9	Penulisan Karya Tulis (Buku)	Penugasan	APBN dan Keuangan Negara	Tim atau individual	Publikasi
10	Penyelenggaraan Workshop	Penugasan	Isu/tema strategis	Tim	Laporan
11	Mengikuti seminar/Lokakarya	Undangan	APBN, Keuangan Negara, dan Ekonomi	Pribadi	Laporan kegiatan



# TATA KELOLA 4 : SIKLUS PRODUK PKA

Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Penguatan Kelembagaan dan Pembinaan Jabfung				Pembahasan RKP dan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN			RUU tentang APBN			Publikasi Ilmiah	
RUU tentang Perubahan APBN (pembahasan selama 1 bulan sejak RUU diajukan oleh Pemerintah) dan Pendampingan											
							RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN				
Pertimbangan DPD											
MINGGU I				RKP disampaikan ke DPR	Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah (Menteri Keuangan & Menteri PPN/Bappenas) dan Gubernur Bank Indonesia: Penyampaian RKP & Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dalam RAPBN dan pembentukan Panja	Kajian RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN <sub>t-1</sub>			Kajian Pertimbangan Tertulis DPD terhadap RUU APBN		
Kajian RUU Perubahan Atas APBN <sub>t</sub>											
MINGGU II				KAJIAN RKP			Presiden Menyampaikan RUU Beserta NK	1. Rapat Tim Perumus Draft RUU APBN 2. Rapat Banggara dengan Menkeu, Bappeas dan BI			
MINGGU III				20 Mei Pemerintah menyampaikan pokok-pokok pembicaraan RAPBN yang meliputi: 1. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal; 2. Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran K/L; 3. Rincian unit organisasi, fungsi, program dan kegiatan		Kajian RUU APBN <sub>t+1</sub>					
				Kajian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebij Fiskal							
MINGGU IV					Raker Komisi I s.d XI Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi-Komisi dgn Mitra Kerjanya: Membahas Rencana Kerja dan Anggaran K/L		1. RDP Komisi-Komisi dengan Mitra Terkial RKA K/L 2. Rapat Komisi-Komisi dengan Mitra Terkial RKA K/L sesuai Hasil Pembahasan Banggar				
KAJIAN RKA K/L											

ARC

## TATA KELOLA 5 : METODE ANALISIS

No	Topik	Metode Analisis
1	Perencanaan Pembangunan, Ekonomi Makro dan Pendapatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Analisis strategis</li><li>2. Analisis sektoral</li><li>3. Pemodelan</li><li>4. Analisis sensitivitas</li><li>5. Analisis keberlanjutan fiskal</li></ol>
2	Belanja Negara dan Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemodelan</li><li>2. Analisis dampak kebijakan</li><li>3. Analisis sektoral</li><li>4. Formula</li><li>5. Analisis dampak kebijakan</li></ol>

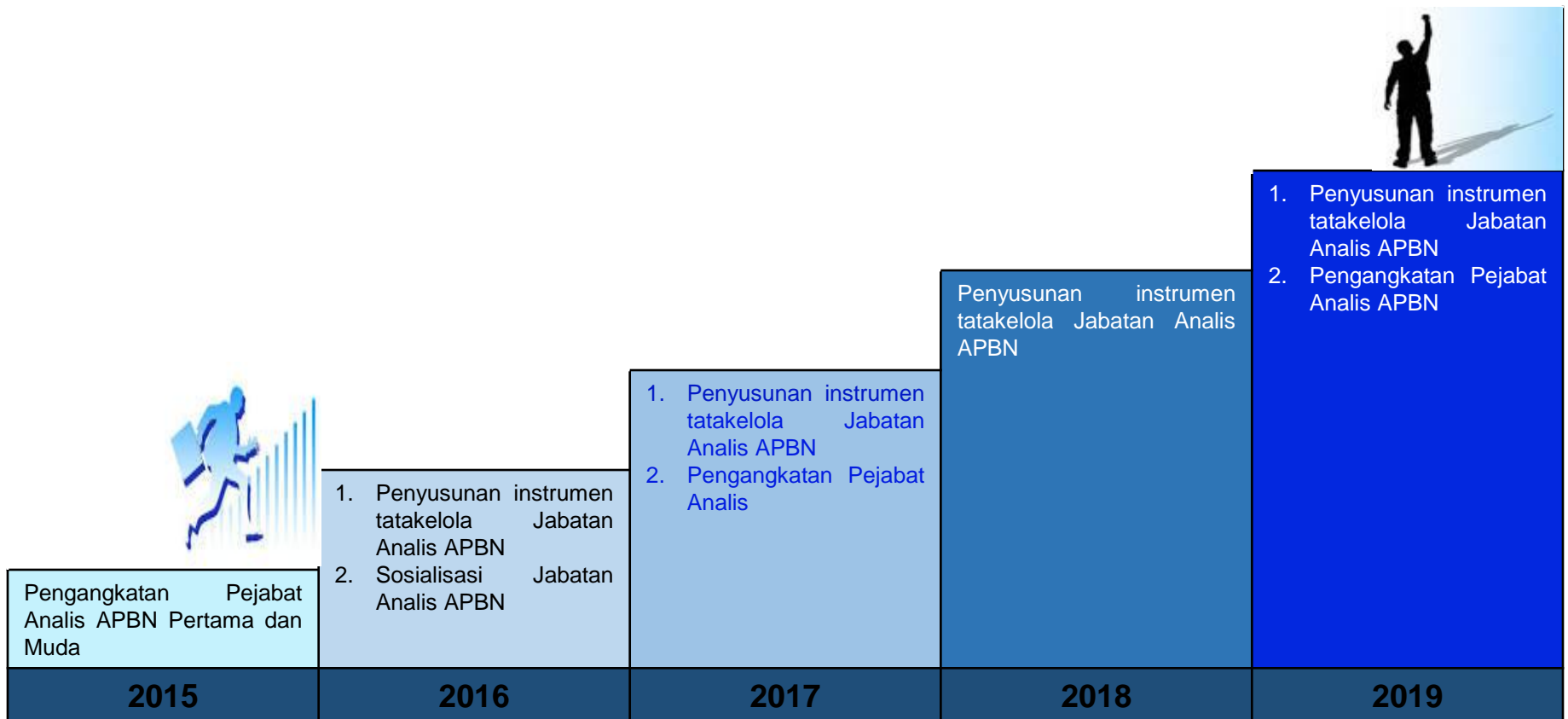
# ANGGARAN 1

	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Komponen Kegiatan	Outcome/Output	Indikator
051	Perumusan bahan kebijakan Pusat Kajian Anggaran	A	Perumusan bahan kebijakan Pusat Kajian Anggaran		
				Rapat Koodinasi	
052	Penyusunan dan Pengembangan analisis/referensi/ laporan APBN	A	Penyusunan analisis/referensi/ laporan APBN		
		1	Penyusunan Analisis APBN	Diskusi/Seminar/Workshop/Lokakarya/FGD Jamuan Rapat Pencetakan dan Penjilidan	
		2	Penyusunan Referensi	Diskusi/Seminar/Workshop/Lokakarya/FGD Jamuan Rapat Pencetakan dan Penjilidan	
		3	Penerbitan Kajian Dwimingguan	Honor Kegiatan Jamuan Rapat Penerbitan Buletin APBN Pencetakan Buletin APBN	
		B	Penerbitan Jurnal/buku		
		1	Penerbitan Jurnal	Tim Redaksi Rapat Penerbitan Jurnal Pencetakan Jurnal Politik Anggaran	Honor Jamuan Rapat Penerbitan Jurnal Politik Anggaran
		2	Penerbitan Buku	Jamuan Rapat Penerbitan Buku Pencetakan Buku	
		C	Penyelenggaraan Database		
		1	Pendalaman dan pengumpulan Data	Jamuan Rapat Perjalanan Dinas Dalam Negeri	
		D	Pembinaan Jabatan Analis APBN.		
		1	Pengembangan Kompetensi	Penyelenggaraan Diklat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Perjalanan Dinas Luar Negeri	
		2	Penyusunan Instrumen Pembinaan	Jamuan Rapat Honor Lembur	
		3	Penilaian Jabatan Fungsional Analis APBN	Honor Kegiatan Jamuan Rapat	
		4	Penyediaan Jabatan Analis APBN/SDM Pendukung	Pengadaan Analis APBN/SDM Pendukung	

# SARANA DAN PRASARANA

No	Sarana dan Prasarana	Rincian	Keterangan (2016)	Akhir Perencanaan (2019)
1	Kebutuhan Ruang	Ruang Kapus	Luas bangunan yang dibutuhkan 20 m <sup>2</sup>	Luas bangunan yang dibutuhkan 20 m <sup>2</sup>
		Ruang Tamu	Luas bangunan yang dibutuhkan 12 m <sup>2</sup>	Luas bangunan yang dibutuhkan 12 m <sup>2</sup>
		Ruang Tata Usaha	Luas bangunan yang dibutuhkan 36 m <sup>2</sup>	Luas bangunan yang dibutuhkan 36 m <sup>2</sup>
		Ruang Rapat Kapus	Luas bangunan yang dibutuhkan 30 m <sup>2</sup>	Luas bangunan yang dibutuhkan 30 m <sup>2</sup>
		Ruang Rapat Sedang	Luas bangunan yang dibutuhkan 60 m <sup>2</sup>	Luas bangunan yang dibutuhkan 60 m <sup>2</sup>
		Ruang Rapat Besar		Luas bangunan yang dibutuhkan 100 m <sup>2</sup>
		Ruang Koordinator	Luas bangunan yang dibutuhkan 9 m <sup>2</sup> x 5 m <sup>2</sup> = 45 m <sup>2</sup>	Luas bangunan yang dibutuhkan 9 m <sup>2</sup> x 3 = 27 m <sup>2</sup>
		Ruang Analisis APBN	Luas bangunan yang dibutuhkan 4 m <sup>2</sup> x 25 = 100m <sup>2</sup>	Luas bangunan yang dibutuhkan 4 m <sup>2</sup> x 55 = 242m <sup>2</sup>
	Ruang Laboratorium APBN	Luas bangunan yang dibutuhkan 60 m <sup>2</sup>	Luas bangunan yang dibutuhkan 60 m <sup>2</sup>	
2	Meubelair	Meja dan Kursi	Menyesuaikan untuk Ruang Kerja; Meja dan Kursi untuk Ruang Tamu, Meja dan Kursi untuk Ruang Rapat Kecil; Meja dan Kursi untuk Ruang Rapat Besar; dan Meja dan Kursi untuk Ruang Laboratorium APBN.	Menyesuaikan untuk Ruang Kerja; Meja dan Kursi untuk Ruang Tamu, Meja dan Kursi untuk Ruang Rapat Kecil; Rapat Besar; Meja dan Kursi untuk Ruang Rapat Besar; dan Meja dan Kursi untuk Ruang Laboratorium APBN.
		Rak Buku	Membutuhkan 32 unit.	Membutuhkan 67 unit.
		Filing Cabinet	Membutuhkan 7 unit.	Membutuhkan 12 unit.
3	Perangkat Lain	ATK	Menyesuaikan.	Menyesuaikan.
4	ICT	Deskstop	Membutuhkan 32 unit.	Membutuhkan 67 unit.
		Laptop	Membutuhkan 7 unit.	Membutuhkan 20 unit.
		Server	Untuk Database dan Web PKA.	Untuk Database dan Web PKA.
		TV	Membutuhkan 3 unit.	Membutuhkan 6 unit.
		Multimedia	Membutuhkan 3 unit.	Membutuhkan 6 unit.
		Pengembangan Web KPA	Memuat Informasi: Home, Berita, Agenda, Profil SDM, Bidang dan Produk, dan <i>Database</i> (diakses oleh PKA).	Memuat Informasi: Home, Berita, Agenda, Profil SDM, Bidang dan Produk, dan <i>Database</i> (diakses oleh PKA).
		Pengembangan Database	Memuat Informasi: Data UU APBN, Data Laporan Keuangan, Data Perencanaan Pembangunan, Data Ekonomi Makro, Data Pendapatan Negara, Data Pembiayaan Negara, Data Belanja K/L, Belanja Daerah, dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Keuangan Negara.	Memuat Informasi: Data UU APBN, Data Laporan Keuangan, Data Perencanaan Pembangunan, Data Ekonomi Makro, Data Pendapatan Negara, Data Pembiayaan Negara, Data Belanja K/L, Belanja Daerah, dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Keuangan Negara.

# PKA SEBAGAI INSTANSI PEMBINA





**TERIMA KASIH**